

PARADIGMA KRITIS DALAM AKUNTANSI SEBAGAI INSTRUMEN EMANSIPATORIS DALAM
PRAKTIK KONTEMPORERIsti Fatehah¹, Sakinatun Nisa², Gunawan Aji³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan

isti.fatehah@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

Accounting is often perceived as a neutral technical tool, yet in practice it operates within complex power relations that frequently marginalize certain social groups. This article aims to examine how the critical accounting paradigm functions as an emancipatory instrument capable of revealing and challenging domination embedded in contemporary accounting practices. This study employs a qualitative approach through a systematic literature review of scholarly publications from 2020-2025 discussing critical accounting, power relations, and emancipatory practices. The findings indicate that accounting constitutes a social-political practice that is value-laden and often reproduces dominant interests through ostensibly objective reporting mechanisms. However, the critical accounting paradigm opens pathways for emancipatory practices, such as counter-accounting and participatory reporting, enabling affected communities to actively engage in accounting processes. This study highlights the importance of developing accounting practices that are more inclusive, reflective, and oriented toward social justice.

Keywords: Critical Accounting; Emancipation; Power Relations; Counter-Accounting; Social Accountability

Abstrak

Akuntansi sering dipahami sebagai alat teknis yang bersifat netral, padahal dalam praktiknya beroperasi dalam relasi kekuasaan yang kompleks dan kerap meminggirkan kelompok sosial tertentu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana paradigma kritis dalam akuntansi berfungsi sebagai instrumen emansipatoris yang mampu mengungkap serta menantang praktik dominasi dalam akuntansi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui *systematic literature review* terhadap publikasi ilmiah periode 2020-2025 yang membahas akuntansi kritis, relasi kekuasaan, dan praktik emansipatoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi merupakan praktik sosial-politik yang tidak bebas nilai dan sering kali mereproduksi kepentingan aktor dominan melalui mekanisme pelaporan formal yang tampak objektif. Namun demikian, paradigma akuntansi kritis membuka ruang bagi praktik emansipatoris, seperti *counter-accounting* dan pelaporan partisipatif, yang memungkinkan komunitas terdampak untuk terlibat secara aktif dalam proses akuntansi. Studi ini menegaskan pentingnya pengembangan praktik akuntansi yang lebih inklusif, reflektif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata Kunci: Akuntansi Kritis; Emansipasi; Relasi Kekuasaan; Counter-Accounting; Akuntabilitas Sosial

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under
a [creative commons](#)
[attribution-noncommercial](#)
[4.0 international license](#)

1. Pendahuluan

Akuntansi semakin dipertanyakan posisinya sebagai sistem pengukuran dan pelaporan yang bersifat netral. Dalam praktik organisasi modern, informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga membentuk relasi kekuasaan yang berdampak langsung pada karyawan, komunitas lokal, serta lingkungan hidup. Dalam konteks ekonomi kapitalis, praktik akuntansi cenderung lebih mengakomodasi kepentingan aktor dominan dan pemilik modal dibandingkan kepentingan sosial yang lebih luas.

Sejumlah kajian kritis menunjukkan bahwa kerangka akuntansi konvensional berperan dalam melegitimasi struktur kekuasaan yang ada melalui representasi realitas organisasi yang tampak objektif dan bebas nilai. Laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering kali berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk mempertahankan legitimasi organisasi, bukan sebagai sarana akuntabilitas substantif. Akibatnya, ketimpangan sosial serta dampak lingkungan yang merugikan cenderung tersamarkan, sementara suara pemangku kepentingan yang terpinggirkan tidak memperoleh ruang representasi yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut juga tercermin baik dalam praktik maupun pendidikan akuntansi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan kerap dimanfaatkan sebagai alat pencitraan reputasi organisasi, sementara analisis kritis terhadap dampak sosial dan lingkungan masih terbatas. Selain itu, pendidikan akuntansi di perguruan tinggi masih didominasi oleh pendekatan positivistik dan teknokratis, sehingga membatasi pengembangan kesadaran kritis mahasiswa terhadap dimensi etis dan sosial akuntansi.

Teori sosial kritis, khususnya yang berkembang dalam tradisi Mazhab Frankfurt, menyediakan landasan konseptual untuk merekonseptualisasi akuntansi sebagai praktik sosial yang terikat dengan relasi kekuasaan. Perspektif ini memungkinkan pemahaman bahwa akuntansi tidak hanya mereproduksi dominasi, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi sarana refleksi, resistensi, dan emansipasi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji paradigma akuntansi kritis sebagai instrumen emansipatoris melalui telaah sistematis terhadap literatur akademik kontemporer. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan kritis memungkinkan akuntansi melampaui fungsi teknisnya dan berperan sebagai praktik reflektif dan partisipatif yang mendukung keadilan sosial dan pemberdayaan pemangku kepentingan.

2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi sebagai Praktik Sosial

Pandangan tradisional memosisikan akuntansi sebagai sistem teknis yang bersifat netral, objektif, dan bebas nilai. Dalam perspektif ini, akuntansi dipahami semata-mata sebagai alat pengukuran dan pelaporan kinerja ekonomi organisasi. Namun, perkembangan studi akuntansi kritis menunjukkan bahwa akuntansi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan institusional tempat ia beroperasi.

Hopwood (1987) menegaskan bahwa akuntansi merupakan praktik sosial yang berperan aktif dalam membentuk realitas organisasi, bukan sekadar mencerminkannya. Melalui angka, laporan, dan indikator kinerja, akuntansi berkontribusi dalam membangun cara pandang tertentu mengenai keberhasilan, efisiensi, dan legitimasi organisasi. Dengan demikian,

akuntansi memiliki implikasi langsung terhadap distribusi sumber daya, pengambilan keputusan, dan relasi kekuasaan antar aktor.

Dalam konteks ini, laporan keuangan dan nonkeuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial yang dapat menguntungkan kelompok tertentu dan meminggirkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, memahami akuntansi sebagai praktik sosial menjadi fondasi penting dalam pengembangan paradigma akuntansi kritis.

Paradigma Kritis dalam Akuntansi

Paradigma kritis dalam akuntansi berakar pada teori sosial kritis, khususnya pemikiran Mazhab Frankfurt yang menekankan emansipasi, refleksi diri, dan pembongkaran relasi dominasi dalam masyarakat. Paradigma ini memandang bahwa pengetahuan, termasuk akuntansi, tidak pernah netral karena selalu diproduksi dalam struktur kekuasaan tertentu.

Laughlin (1987) menyatakan bahwa akuntansi kritis bertujuan untuk mengungkap asumsi-asumsi ideologis yang tersembunyi di balik praktik akuntansi arus utama. Akuntansi konvensional sering kali mereproduksi logika kapitalisme dengan memprioritaskan kepentingan pemilik modal, efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan finansial, sementara mengabaikan dampak sosial dan lingkungan.

Dalam literatur kontemporer, paradigma akuntansi kritis berkembang dengan mengintegrasikan perspektif Foucault mengenai relasi pengetahuan dan kekuasaan, serta teori tindakan komunikatif Habermas. Akuntansi dipahami sebagai wacana yang dapat berfungsi baik sebagai alat dominasi maupun sebagai medium resistensi dan perubahan sosial (Kamayanti & Lutfillah, 2022).

Relasi Kekuasaan dalam Praktik Akuntansi

Relasi kekuasaan merupakan isu sentral dalam kajian akuntansi kritis. Foucault (1980) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat represif, melainkan bekerja secara produktif melalui praktik diskursif, termasuk akuntansi. Angka dan laporan akuntansi menciptakan “kebenaran” yang diterima secara luas dan jarang dipertanyakan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik pelaporan perusahaan sering kali merepresentasikan realitas dari sudut pandang manajemen dan pemegang saham, sementara suara karyawan, komunitas lokal, dan lingkungan hidup kurang mendapatkan ruang (Masyhuri & Prastiwi, 2023). Ketimpangan representasi ini memperkuat dominasi aktor tertentu dan membatasi akuntabilitas organisasi terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dalam konteks keberlanjutan, misalnya, laporan berbasis Global Reporting Initiative (GRI) sering kali dikritik karena bersifat simbolik dan berorientasi legitimasi, bukan transformasi substantif. Akuntansi, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat legitimasi sosial yang menutupi relasi kuasa dan konflik kepentingan yang ada.

Akuntansi Emansipatoris dan Counter-Accounting

Sebagai respons terhadap keterbatasan akuntansi konvensional, berkembang konsep akuntansi emansipatoris yang menekankan peran akuntansi dalam mendukung keadilan sosial dan pemberdayaan. Akuntansi emansipatoris bertujuan untuk membongkar struktur dominasi dan membuka ruang partisipasi bagi kelompok yang terpinggirkan.

Salah satu bentuk praktik emansipatoris adalah *counter-accounting*, yaitu produksi informasi akuntansi alternatif yang menantang narasi resmi organisasi (Weruin & Sudirgo, 2024). Counter-accounting memungkinkan komunitas terdampak untuk menyuarakan pengalaman,

kerugian sosial, dan dampak lingkungan yang tidak tercermin dalam laporan formal perusahaan.

Selain itu, pelaporan partisipatif dan dialogis menjadi pendekatan penting dalam akuntansi kritis. Widianingsih (2021) menekankan bahwa proses akuntansi yang melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dapat meningkatkan kesadaran kritis dan memperkuat akuntabilitas sosial. Dalam kerangka ini, akuntansi tidak lagi diposisikan sebagai alat teknokratis, melainkan sebagai proses sosial yang bersifat reflektif dan komunikatif.

Pendidikan Akuntansi Kritis dan Transformasi Praktik

Paradigma kritis tidak hanya relevan dalam praktik organisasi, tetapi juga dalam pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi yang terlalu menekankan aspek teknis dan positivistik berpotensi melanggengkan cara pandang sempit tentang peran akuntansi dalam masyarakat. Kamayanti dan Lutfillah (2022) menegaskan pentingnya pendekatan pedagogi kritis dalam pendidikan akuntansi untuk menumbuhkan kesadaran etis, reflektif, dan emansipatoris mahasiswa. Pendidikan akuntansi kritis mendorong mahasiswa untuk mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh praktik akuntansi, serta bagaimana akuntansi dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial.

Transformasi pendidikan akuntansi menjadi prasyarat penting bagi pengembangan praktik akuntansi emansipatoris di masa depan. Tanpa perubahan paradigma dalam pendidikan, akuntansi akan terus direproduksi sebagai alat teknis yang mendukung status quo.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review* (SLR). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konseptual dan praktis paradigma akuntansi kritis sebagai instrumen emansipatoris.

Sumber data penelitian berupa artikel jurnal *peer-reviewed* yang diterbitkan pada periode 2020-2025 dan terindeks pada basis data bereputasi, seperti Scopus, Web of Science, dan DOAJ. Proses penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci “critical accounting”, “emancipatory accounting”, “counter-accounting”, dan “accounting and power”. Artikel dipilih berdasarkan relevansi topik, ketersediaan *full text*, serta ketepatan metodologis.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan familiarisasi data, pengodean awal, pengelompokan tema, dan sintesis temuan. Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi teoretis dengan membandingkan berbagai perspektif dan konteks penelitian yang berbeda.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kuantitatif deskriptif. Menurut Setyawati et al., (2022) penelitian kuantitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, peristiwa, dan gejala yang terjadi secara sistematis, faktual, serta akurat pada sebuah perusahaan tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Akuntansi sebagai Praktik Sosial dan Politik

Hasil *systematic literature review* menunjukkan kesepakatan yang relatif kuat dalam literatur bahwa akuntansi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik teknis yang netral dan objektif. Sebaliknya, akuntansi beroperasi sebagai praktik sosial dan politik yang secara aktif membentuk realitas organisasi dan masyarakat. Sistem pengukuran, pelaporan, serta

indikator kinerja yang digunakan dalam akuntansi merefleksikan kepentingan dan nilai dari aktor dominan, terutama manajemen dan pemilik modal.

Sejumlah studi menegaskan bahwa melalui proses standarisasi dan formalisasi, akuntansi menghasilkan narasi tunggal mengenai kinerja dan keberhasilan organisasi yang diterima sebagai “kebenaran objektif”. Narasi ini sering kali mengaburkan dampak sosial dan lingkungan, serta membatasi ruang kritik terhadap keputusan organisasi. Dengan demikian, akuntansi berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatat realitas, tetapi juga sebagai mekanisme produksi dan legitimasi kekuasaan.

Temuan ini memperkuat argumen paradigma akuntansi kritis yang memandang bahwa akuntansi selalu terikat pada konteks historis, institusional, dan ideologis tertentu. Dalam konteks ekonomi kapitalis, akuntansi cenderung mereproduksi logika efisiensi dan profitabilitas, sehingga berpotensi mengesampingkan dimensi keadilan sosial.

Relasi Kekuasaan dan Ketimpangan Representasi dalam Pelaporan

Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan menjadi isu sentral dalam praktik akuntansi kontemporer. Mekanisme pelaporan keuangan dan nonkeuangan, termasuk laporan keberlanjutan, sering kali lebih merepresentasikan perspektif organisasi dibandingkan pengalaman nyata para pemangku kepentingan yang terdampak. Kelompok seperti karyawan tingkat bawah, komunitas lokal, dan lingkungan hidup cenderung berada pada posisi yang kurang terwakili dalam narasi akuntansi formal.

Literatur menunjukkan bahwa ketimpangan representasi ini bukanlah akibat dari keterbatasan teknis semata, melainkan hasil dari konstruksi sosial akuntansi yang berpihak. Informasi yang dianggap relevan dan material ditentukan oleh aktor yang memiliki kekuasaan dalam organisasi, sehingga isu-isu sosial tertentu dinormalisasi atau bahkan diabaikan.

Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, beberapa studi menyoroti kecenderungan perusahaan menggunakan laporan tersebut sebagai alat legitimasi simbolik. Pelaporan dilakukan untuk memenuhi tuntutan regulasi atau membangun citra positif, bukan untuk mendorong perubahan substantif. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi dapat berfungsi sebagai instrumen hegemoni yang mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

Akuntansi Kritis sebagai Instrumen Emansipatoris

Meskipun akuntansi kerap berperan dalam mereproduksi dominasi, hasil kajian juga menunjukkan adanya potensi emansipatoris yang signifikan ketika akuntansi didekati melalui paradigma kritis. Akuntansi kritis membuka ruang untuk mempertanyakan asumsi dasar, kepentingan yang dilayani, serta dampak sosial dari praktik akuntansi konvensional.

Salah satu bentuk konkret dari potensi emansipatoris ini adalah praktik *counter-accounting*. *Counter-accounting* dipahami sebagai upaya sistematis untuk menghasilkan informasi alternatif yang menantang narasi resmi organisasi. Melalui pendekatan ini, kelompok masyarakat dan komunitas terdampak dapat mengartikulasikan pengalaman, kerugian sosial, dan dampak lingkungan yang tidak tercermin dalam laporan akuntansi formal.

Selain itu, praktik pelaporan partisipatif dan dialogis juga muncul sebagai strategi penting dalam akuntansi emansipatoris. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan interpretasi informasi akuntansi. Dengan melibatkan berbagai suara, akuntansi berpotensi bertransformasi dari alat pengendalian menjadi medium dialog, refleksi, dan pembelajaran kolektif.

Implikasi Teoretis dan Praktis dari Temuan Penelitian

Secara teoretis, hasil kajian ini memperkuat posisi akuntansi kritis sebagai pendekatan yang relevan untuk memahami kompleksitas praktik akuntansi dalam masyarakat kontemporer. Sintesis literatur menunjukkan bahwa konsep kekuasaan, wacana, dan emansipasi merupakan elemen kunci dalam analisis akuntansi yang melampaui pendekatan positivistik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus akuntansi kritis, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi organisasi, praktisi akuntansi, dan pembuat kebijakan. Pengembangan praktik akuntansi yang lebih inklusif dan reflektif dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas sosial dan memperkuat hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan. Bagi pendidik akuntansi, hasil kajian ini menegaskan urgensi integrasi perspektif kritis dalam kurikulum guna membentuk akuntan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan sosial.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berada pada posisi ambivalen: di satu sisi berpotensi memperkuat relasi kekuasaan yang timpang, namun di sisi lain dapat menjadi instrumen emansipatoris apabila didekati secara kritis. Paradigma akuntansi kritis menawarkan kerangka konseptual dan metodologis untuk mereorientasi praktik akuntansi menuju keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi.

Temuan ini menegaskan bahwa transformasi akuntansi tidak hanya bergantung pada perubahan standar atau regulasi, tetapi juga pada perubahan cara pandang aktor-aktor yang terlibat dalam praktik dan pendidikan akuntansi. Dengan demikian, akuntansi kritis memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas melalui praktik akuntabilitas yang berkeadilan.

Literatur yang ditelaah secara konsisten menunjukkan bahwa akuntansi bukanlah aktivitas yang netral atau semata-mata teknis, melainkan praktik sosial-politik yang tertanam dalam struktur kekuasaan organisasi dan masyarakat. Sistem pelaporan keuangan maupun nonkeuangan membentuk persepsi tentang kinerja, akuntabilitas, dan tanggung jawab dengan lebih mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan dominan, sehingga memengaruhi pengambilan keputusan organisasi dan wacana publik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa paradigma akuntansi kritis memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen emansipatoris dalam praktik akuntansi kontemporer. Akuntansi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang netral, melainkan sebagai aktivitas yang terikat dengan relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu. Pendekatan kritis membuka ruang bagi transformasi melalui praktik akuntansi yang partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya diskursus akuntansi kritis dengan menyintesis perspektif mengenai kekuasaan dan emansipasi. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan perlunya pengembangan praktik dan pendidikan akuntansi yang lebih reflektif dan inklusif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder, sehingga penelitian empiris di masa depan diperlukan untuk menguji implementasi akuntansi emansipatoris dalam konteks organisasi dan komunitas yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Bebbington, C. Larrinaga, and J. Unerman, "Social and environmental accounting and reporting: What is the question?," *Account. Audit. Account. J.*, vol. 27, no. 2, pp. 195-219,

2014, doi: 10.1108/AAAJ-03-2013-1260.

[2] J. Brown and J. Dillard, "Agonistic pluralism and accounting for social and environmental change," *Account. Audit. Account. J.*, vol. 28, no. 3, pp. 317-342, 2015, doi: 10.1108/AAAJ-05-2013-1341.

[3] E. Chiapello, "Critical accounting in the age of neoliberalism," *Account. Organ. Soc.*, vol. 96, p. 101273, 2021, doi: 10.1016/j.aos.2021.101273.

[4] C. Cooper and T. Hopper, "Critical accounting research," in *The Routledge Companion to Accounting Theory*, London: Routledge, pp. 259-276, 2020.

[5] J. Dillard and R. Roslender, "The emancipatory potential of critical accounting: Contemporary challenges and future directions," *Crit. Perspect. Account.*, vol. 79, p. 102249, 2022, doi: 10.1016/j.cpa.2021.102249.

[6] R. Gray, "Taking a long view on what we now know about social and environmental accountability and reporting," *Issues Soc. Environ. Account.*, vol. 4, no. 2, pp. 169-198, 2010.

[7] A. Kamayanti and N. Q. Lutfillah, "Storytelling as an alternative of teaching (critical) accounting theory," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 13, no. 1, pp. 164-179, 2022, doi: 10.21776/ub.jamal.2022.13.1.12.

[8] M. Masyhuri and T. E. Prastiwi, "Analisis realitas sustainability pada Global Reporting Initiative (GRI) berdasarkan perspektif critical accounting study," *J. Akunt. Keuang. Syariah*, vol. 3, no. 1, pp. 1-15, 2023.

[9] R. Laughlin, "Critical reflections on research approaches, accounting regulation and the regulation of accounting," *Br. Account. Rev.*, vol. 43, no. 1, pp. 1-16, 2011, doi: 10.1016/j.bar.2010.10.004.

[10] P. Sikka, "Accounting and social justice: Political economy perspectives," *Account. Forum*, vol. 45, no. 4, pp. 455-470, 2021, doi: 10.1080/01559982.2021.1940125.

[11] L. N. Tarigan, A. Fachturian, K. A. Savitry, E. B. Putriadi, and L. Fitri, "Perkembangan teori akuntansi dalam arus globalisasi: Perspektif kritis," *J. Akad. Ekon. Manaj.*, vol. 2, no. 2, pp. 45-58, 2023.

[12] U. U. Weruin and T. Sudirgo, "Akuntansi emansipatoris: Analisis kritis terhadap peran dan praktik akuntansi dalam ekonomi kapitalis," *Innovative: J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 4, pp. 9369-9386, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i4.10245.

[13] L. P. Widianingsih, "Pendidikan dialogis nan membebaskan: Kajian bagi pendidikan akuntansi (kritis)," *J. Pendidik. Akunt. Keuang.*, vol. 9, no. 2, pp. 113-126, 2021, doi: 10.17509/jpak.v9i2.38421.